

Tingkatkan Kualitas SDM, DBMSDA Kota Bekasi Gelar Pelatihan Informatika

Category: News

11 Juli 2025



Tingkatkan Kualitas SDM, DBMSDA Kota Bekasi Gelar Pelatihan Informatika.

KOTA BEKASI, Prolite – Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi menggelar pelatihan informatika dan pemanfaatan media sosial bagi jajaran pegawai, Kamis (10/7), bertempat di ruang rapat kantor DBMSDA.

Pelatihan ini difokuskan pada penguatan kapasitas dalam penanganan pengaduan masyarakat serta penyusunan konten pemberitaan untuk publikasi kegiatan dinas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi komunikasi publik DBMSDA guna memperkuat transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Hadir sebagai narasumber, Muhammad Muchlis dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi. Ia memberikan pembekalan teknis kepada para pegawai di bidang publikasi dan dokumentasi media DBMSDA, termasuk perwakilan dari Diskominfostandi.

Dalam paparannya, Muchlis menjelaskan pentingnya penguasaan prinsip-prinsip dasar jurnalistik, terutama dalam menerapkan kaidah 5W + 1H (What, Who, When, Where, Why, dan How) dalam setiap penulisan berita dinas. Ia juga menekankan pentingnya ketepatan informasi serta konsistensi dalam penyampaian pesan publik oleh instansi pemerintahan.

Kegiatan pelatihan ini merupakan arahan langsung dari Kepala Dinas BMSDA Kota Bekasi, yang menekankan pentingnya peran setiap pegawai dalam mendukung publikasi kegiatan dinas secara efektif dan profesional.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama antara narasumber dan seluruh peserta pelatihan sebagai bentuk dokumentasi dan apresiasi atas partisipasi aktif para peserta dalam kegiatan In-House Training ini.



Paripurna DPRD Bekasi: Bahas RPJMD, Sampah, Lalu Lintas dan Teken Pembentukan Pansus

Baru

Category: Daerah
11 Juli 2025



DPRD Kota Bekasi Tandatangani Keputusan Penugasan Banggar dan Bentuk Pansus 04 & 05 di Rapat Paripurna

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/6/2025) bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Bekasi, dengan agenda utama penandatanganan Keputusan DPRD tentang penugasan Badan Anggaran (Banggar) terkait hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) 04 dan 05.



Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M.,

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M., bersama Wakil Ketua DPRD Nuryadi Darmawan RS., ., M.H., Faisal, S.E., dan Puspa Yani, ., serta dihadiri

oleh perwakilan legislatif, eksekutif, ormas, tokoh masyarakat, dan unsur undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bekasi turut menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029, yang menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan.

Selain itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi juga memberikan penjelasan mengenai dua Raperda penting, yakni Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2021 mengenai pengelolaan sampah dan Raperda perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Puncak kegiatan ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan dua keputusan DPRD Kota Bekasi:

Keputusan tentang Penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024.

Keputusan tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) 04 dan 05 DPRD Kota Bekasi yang akan mengawal pembahasan dan pengawasan terhadap isu-isu strategis daerah.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, menegaskan bahwa penugasan Banggar dan pembentukan dua Pansus ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam memastikan akuntabilitas keuangan daerah dan pelaksanaan program strategis pemerintah berjalan optimal.

“Paripurna hari ini menunjukkan komitmen DPRD dalam mengawal transparansi, perencanaan pembangunan jangka menengah, serta penegakan regulasi yang berdampak langsung bagi warga Kota Bekasi,” ujarnya usai penandatanganan.

Dewan Minta Pemkot Bekasi Tekan Angka Pengangguran dengan Terobosan Program

Category: Politik & Parlemen

11 Juli 2025



Dewan Minta Pemkot Bekasi Tekan Angka Pengangguran dengan Terobosan Program

Prolite – Tingginya angka pengangguran masyarakat kota Bekasi saat ini cukup memprihatinkan.

Ini dirasakan Anggota DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah.

Dia berharap Pemkot Bekasi dapat melakukan terobosan-terobosan dengan program-program efektif untuk menekan angka pengangguran di kota Bekasi.

Khususnya untuk warga lokal Kota Bekasi, mereka harus bersaing

ketat dengan pendatang dari luar daerah untuk dapat pekerjaan di Kota Bekasi.

Rudy mengatakan Pemkot Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja diharapkan bisa memperbanyak peluang pekerjaan bagi masyarakat kota Bekasi.

Sementara itu Upah Minimum Kota Bekasi terbilang cukup tinggi sehingga menjadi daya tarik orang luar daerah untuk datang ke Kota Bekasi, sedangkan tidak banyak industri di Kota Bekasi.

"Ini yang membuat masyarakat lokal harus bersaing ketat untuk dapat pekerjaan. Disnaker harus bisa menciptakan peluang-peluang supaya masyarakat lokal yang menganggur bisa bekerja," ungkapnya.

Alimudin Nilai Pembangunan Infrastruktur Kota Bekasi Lambat

Category: Politik & Parlemen
11 Juli 2025



Alimudin Nilai Pembangunan Infrastruktur Kota Bekasi Lambat

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Alimudin menilai realisasi pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi terkesan lambat. Menurutnya ini dapat berdampak langsung pada masyarakat.

Masyarakat mempertanyakan kinerja pemerintah daerah terkait keterlambatan pembangunan di Kota Bekasi.

Dia meminta perangkat daerah terkait untuk terus meningkatkan kualitas kerja, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang dilakukan setiap tahun.

” Ini (keterlambatan pembangunan infrastruktur, red) seharusnya tidak terjadi. Sebab, pembangunan fisik merupakan kegiatan rutin yang sudah biasa dilaksanakan pemerintah setiap tahunnya,” ujarnya.

“Ini menunjukkan kinerja dari OPD terkait tidak memiliki kualitas yang bagus,” tambahnya.

Menurutnya evaluasi kinerja perangkat daerah perlu dilakukan oleh Pemkot Bekasi, sehingga dapat memberi dampak positif di masyarakat.

Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi Bahas Laporan Komisi Terkait LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 dan Penandatanganan Kesepakatan Persetujuan Raperda

Category: Daerah
11 Juli 2025



Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi Bahas Laporan Komisi Terkait LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 dan Penandatanganan Kesepakatan Persetujuan Raperda

BEKASI, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna penting hari ini Senin (19/05/2025) dalam rangka mendengarkan laporan dari Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kota Bekasi mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2024. Rapat ini juga menjadi momentum penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi, Ibu Puspa Yani, . Turut hadir dalam acara tersebut Walikota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, dan Wakil Walikota, Dr. Abdul Harris Bobihoe, beserta jajaran perangkat daerah Kota Bekasi.



dok DPRD Bekasi

Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi menyampaikan hasil pembahasan dan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024. Laporan komisi mencakup berbagai aspek pembangunan dan kinerja Pemerintah Kota Bekasi selama tahun anggaran 2024, termasuk capaian program, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi, Puspa Yani, ., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada komisi-komisi yang telah bekerja keras dalam menelaah LKPJ tersebut. Beliau menekankan pentingnya LKPJ sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat melalui representasi DPRD.

Ketua DPRD, Dr. Sardi Efendi, ., M.M mengatakan paripurna LKPJ ini kaitan rekomendasi capain kinerja para OPD kaitan

indikator kinerja utama daerah sehingga kita minta diperbaiki kedepannya dan juga bahan untuk RPJMD 2025 sd 2030 sebagai bahan dasar atau titik tolaknya.

Setelah penyampaian laporan dari masing-masing komisi, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan persetujuan Raperda antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi. Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan akuntabel di Kota Bekasi.

Walikota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Bekasi atas pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan. Beliau menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kota Bekasi.

Rapat Paripurna ini berjalan dengan lancar dan khidmat, menunjukkan sinergitas yang baik antara lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Edukasi Kesiapsiagaan Sejak Usia Dini Diapresiasi Wali Kota Bekasi

Category: Daerah
11 Juli 2025



Wali Kota Dukung Edukasi Kesiapsiagaan Sejak Usia Dini

KOTA BEKASI, Prolite – Edukasi tentang sesiapsiagaan sejak usia dini yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi di Car Free Day hari ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto

Bertajuk “Kesiapsiagaan Sejak Usia Dini”, kegiatan ini melibatkan peserta dari kalangan anak-anak, dengan tujuan menanamkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Anak-anak diajak untuk mengenal berbagai jenis bencana, memahami langkah-langkah penyelamatan diri, hingga berlatih simulasi sederhana menghadapi situasi darurat. Kegiatan ini dikemas secara interaktif dan menyenangkan agar mudah dipahami dan diingat oleh anak-anak.



Wali Kiota Bekasi mengatakan bahwa membangun budaya kesiapsiagaan sejak usia dini sangat penting, mengingat Kota

Bekasi sebagai kawasan urban yang memiliki potensi risiko bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam.

"Anak-anak adalah generasi masa depan. Dengan membekali mereka sejak dini, kita membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai kemungkinan," Kata Wali Kota.

Kegiatan CFD pagi ini berjalan lancar dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Banyak orang tua yang mengapresiasi adanya kegiatan edukatif di tengah rutinitas CFD, karena dapat menjadi tambahan ilmu sekaligus hiburan bagi anak-anak.

Wali Kota Bekasi Sapa Warga Lewat Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Al Ikhlas Marga Mulya

Category: Daerah
11 Juli 2025



Wali Kota Bekasi Sapa Warga Lewat Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Al Ikhlas Marga Mulya

KOTA BEKASI, Prolite – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, kembali menyapa warga melalui kegiatan Shalat Jumat Berjamaah yang kali ini dilaksanakan di Masjid Al Ikhlas, RW 05, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara.

Kehadiran Wali Kota Bekasi disambut hangat oleh warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak hanya menunaikan ibadah, tetapi juga menyampaikan sejumlah pesan penting serta mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Salah satu topik yang dibahas adalah mengenai rencana infrastruktur pembangunan di Kota Bekasi, khususnya terkait proyek flyover baru yang terhubung ke Stasiun Bekasi. Tri mengakui bahwa proyek tersebut sempat menjadi perhatian masyarakat karena menimbulkan kemacetan dan perubahan akses jalan. Namun, ia menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari upaya jangka panjang dalam memperbaiki konektivitas dan mobilitas warga.

"Kami paham adanya dampak sementara, tapi rencana flyover ini akan jadi solusi besar dalam mengurai kepadatan lalu lintas, terutama di kawasan yang menjadi simpul transportasi seperti stasiun," ujarnya.



Dalam interaksi langsung dengan jamaah, Tri juga mengingatkan masyarakat bahwa segala keluhan, saran, atau laporan terkait kondisi Kota Bekasi dapat disampaikan langsung melalui akun Instagram pribadinya di @mastriadhianto.

"Silakan DM saya langsung aktif 24 jam, Kita ingin respons cepat, transparan, dan dekat dengan warga," tambahnya.

Menanggapi aspirasi ekonomi warga, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha peternakan ayam petelur. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi siap memfasilitasi program pemberdayaan berbasis usaha mikro yang bisa mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Tak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada generasi muda. Tri menyebutkan bahwa Pemkot Bekasi tengah menyiapkan program khusus bagi anak-anak berprestasi yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri. Program ini ditujukan untuk membekali anak-anak Bekasi agar memiliki daya saing global dan siap bekerja di berbagai bidang strategis.

"Anak-anak Bekasi harus punya mimpi besar. Kita akan bantu siapkan jalur beasiswa dan pelatihan, agar mereka bisa belajar ke luar negeri dan kembali membangun kota ini," tegas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Kegiatan Shalat Jumat Berjamaah ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sebagai wujud kepemimpinan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Usulkan Lakukan Operasi Yustisi untuk Warga Pendatang

Category: News

11 Juli 2025



Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Usulkan Lakukan Operasi Yustisi untuk Warga Pendatang

KOTA BEKASI, Prolite – Komisi I DPRD Kota Bekasi merekomendasikan pemberlakuan kembali Operasi Yustisi terhadap warga pendatang yang bermukim di Kota Bekasi pasca pelaksanaan Lebaran Idul Fitri.

Momen Lebaran Idul Fitri telah usai para masyarakat yang sempat mudik sudah kembali lagi ke Kota Bekasi.

Pendataan penduduk perlu dilakukan untuk memperbaiki system serta operasi terutama dilakukan kepada warga urbanisasi.

Dengan dilakukan operasi Yustisi ini maka Kota Bekasi bisa meminimalkan tingkat penganggiran di wilayahnya.

“Saya pikir Operasi Yustisi adalah langkah yang diperlukan, asalkan sesuai dengan ketentuan administrasi, misalnya warga yang sudah tinggal selama satu tahun wajib memiliki KTP Kota

Bekasi. Pendataan ini penting untuk memastikan bahwa kerja Pemerintah Kota benar-benar optimal dan tidak diabaikan," ujar Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah, dalam keterangannya, Rabu (09/04/2024).



detikcom

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi menjelaskan bahwa fenomena urbanisasi tidak dapat dihindari, mengingat Kota Bekasi berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai wilayah penyangga.

Hal ini menjadikan Bekasi sebagai tujuan utama warga urban untuk mencari peluang hidup baru.

Namun, ia juga menyoroti situasi Kota Bekasi yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya tingkat pengangguran pasca-pandemi Covid-19.

"Tantangan di Bekasi saat ini cukup besar. Berdasarkan data, ada hampir 200 ribu tenaga kerja yang masih menganggur setelah pandemi Covid-19. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan baru Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris dalam 100 hari program kerja mereka untuk menciptakan Kota Bekasi yang lebih baik," tambah Rudy.

Sebagai langkah konkret, Rudy menyarankan agar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi dapat lebih selektif terhadap warga pendatang yang berniat menetap di Bekasi.

la menilai, jika tidak segera ditangani, meningkatnya jumlah pendatang dapat menimbulkan keresahan baru, terutama jika pendatang tidak memiliki pekerjaan atau keterampilan yang memadai.

"Jika tidak ditangani, ini akan menambah masalah sosial, terutama bagi warga pendatang yang datang hanya untuk menganggur. Pemerintah Kota perlu mengatur agar warga

pendatang yang menetap di Bekasi benar-benar memiliki tujuan dan keterampilan yang bisa mendukung perekonomian," ungkapnya.

Rudy juga menyarankan agar setiap warga daerah berkontribusi dalam membangun wilayah asalnya sendiri. Ia menekankan pentingnya keterampilan dan kesiapan kompetitif bagi mereka yang hendak mencoba peruntungan di wilayah metropolitan seperti Kota Bekasi.

Komisi II DPRD Kota Bekasi Panggil Kadis LH Usai Ditemukan Limbah Medis di TPA Sumur Batu Kota Bekasi

Category: News
11 Juli 2025



Komisi II DPRD Kota Bekasi Panggil Kadis LH Usai Ditemukan Limbah Medis di TPA Sumur Batu Kota Bekasi

KOTA BEKASI, Prolite – Komisi II DPRD Kota Bekasi bakal memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yudianto. Pemanggilan itu dilakukan setelah adanya temuan limbah medis di TPA Sumur Batu Kota Bekasi, Minggu (20/4).

“Besok (hari ini, red) saya akan memanggil kepala Dinas LH terkait dengan sampah medis yang dibuang secara langsung ke TPA Sumur Batu,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, H. Anton, , Senin (21/4).

Limbah medis sempat ditemukan olehnya itu kini sedang dilakukan oemantauan, bukan hanya itu ia juga menyaksikan bahwa adanya limbah yang dibuang ke TPA Sumur Batu tersebut berasal dari beberapa rumah sakit.

Keberadaan limbah rumah sakit yang dibuang ke TPA Sumur Batu ini sangat membahayakan bagi orang yang beraktivitas disekitar area.

Oleh karenanya Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi ini meminta agar Kelapa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi untuk mendatangi lokasi.

“Saya minta kepada kepala dinas untuk menyidak langsung, datang langsung ke zona tersebut,” ungkapnya.

Anton mengingatkan bahwa pengelolaan sampah saat ini tengah menjadi perhatian khusus dari Menteri Lingkungan Hidup. Lokasi temuan limbah medis tersebut adalah zona pembuangan sampah yang sudah tidak aktif, ia menduga ada oknum yang mencari keuntungan dibalik bahaya limbah medis tersebut.

“Zonanya sudah tidak aktif. Ini sengaja sepertinya ada oknum yang membuat sampah kesitu karena ingin menghasilkan keuntungan,” ucapnya.

Anton meminta agar pengawasan di lingkungan TPA Sumur Batu menjadi perhatian Pemkot Bekasi, nampak di lokasi terdapat celah akses masuk ke area TPST. Bidang penegakan hukum (Gakkum) DLH Kota Bekasi harus bertindak tegas, Anton juga menyarankan agar DLH Kota Bekasi memeriksa jika terdapat CCTV untuk mengetahui jejak pembuang limbah medis tersebut.

“Saya kira ini masuk lewat pinggir, makanya ini dinas harus lihat di pinggir-pinggir (TPA) ini tidak ditembok ya. Ini harus menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Bekasi tentang sampah ini,” tambahnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi benar-benar harus ekstra memperbaiki pengelolaan sampah. Seperti ratusan daerah lain di Indonesia, diketahui Pemkot Bekasi saat ini tengah berlomba dengan waktu, mengganti sistem pengolahan Open Dumping menjadi Sanitary Landfill setelah mendapat teguran dari Menteri Lingkungan Hidup.

Ketua DPRD Kota Bekasi Terima Audiensi Perwakilan Mahasiswa UBHARA JAYA Terkait RUU TNI Kontroversial

Category: Daerah
11 Juli 2025



Ketua DPRD Kota Bekasi Terima Audiensi Perwakilan Mahasiswa UBHARA JAYA Terkait RUU TNI Kontroversial

BEKASI, Prolite – Ketua DPRD Kota Bekasi telah menerima

audiensi dari lima orang perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA) dan Aliansi Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada hari Selasa, (15/04/2025), bertempat di gedung DPRD Kota Bekasi.



dok

Dalam pertemuan tersebut, lima orang perwakilan BEM UBHARA JAYA menyampaikan kekecewaan mereka atas kurangnya respons dari DPRD Kota Bekasi terhadap surat permohonan audiensi yang telah dilayangkan sebelumnya. Mereka menyoroti berbagai pasal dalam RUU TNI yang dianggap kontroversial dan berpotensi mengancam supremasi sipil serta prinsip-prinsip demokrasi.

Ketua DPRD Kota Bekasi menyambut baik kedatangan para perwakilan mahasiswa dan mendengarkan dengan seksama aspirasi yang disampaikan. Beliau menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam isu-isu kenegaraan.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Bekasi menyatakan komitmennya untuk menjaga demokrasi dengan menjunjung tinggi supremasi sipil sebagai wujud kedaulatan rakyat. Beliau juga berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dan membawa isu ini ke dalam pembahasan lebih lanjut di tingkat DPRD Kota Bekasi.